

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sampai pada pelaporan hasil kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini memuat tentang pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021. Program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan target capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan pembangunan di desa dan kelurahan pada khususnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum.

Kuala Tungkal, Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP

Pembina

NIP. 19740506 199403 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Sistematika Pembahasan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran	10
BAB IV PENUTUP	13
Lampiran; Perjanjian Kinerja 2021	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2021

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DPMD Tahun 2019	7
Tabel III.1 Pencapaian Kinerja	8
Tabel III.2 Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2021	10-12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja, akan dimungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2021 ini, dengan total anggaran Rp5.695.815.419,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.696.231.241,- atau 82,45%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain;

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD TAHUN 2021

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/XI/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
 3. Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat
 - c. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam
 4. Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Desa dan Bina Administrasi Desa
 - b. Seksi Administrasi dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - c. Seksi Bina Kelembagaan dan Evaluasi Perkembangan Desa
 5. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa terdiri dari :

- a. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Seksi Bina Pengelolaan Aset Desa
- c. Seksi Fasilitas Pendapatan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan dibidang Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan perdesaan , Bina administrasi pemerintahan desa dan Bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan perdesaan , Bina administrasi pemerintahan desa dan Bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan perdesaan , Bina administrasi pemerintahan desa dan Bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan perdesaan , Bina administrasi pemerintahan desa dan Bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
- b. Meningkatkan Perekonomian Perdesaan dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

- a. Meningkatnya Penataan Desa
- b. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan oleh Desa
- c. Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

- a. Persentase Desa dengan Penataan yang Baik
- b. Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi
- c. Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi
- d. Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan

Pencapaian sasaran strategis

Strategi adalah cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien adalah;

- a. Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan desa secara lebih profesional dan efisien melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
- b. Mendorong terbentuknya dan aktifnya BUM desa dan BUMdesa bersama serta peningkatan kerjasama desa yang difasilitasi oleh BKAD.
- c. Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan, ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pelaksanaan 10 program pokok PKK serta pengembangan usah ekonomi masyarakat.

Kebijakan yang dilaksanakan;

- a. Melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan Perangkat desa serta pengurus BUM desa
- b. Penyusunan peraturan tata pemerintahan dengan dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih tinggi
- c. Melakukan pembinaan terhadap BUM desa dan BUM desa bersama serta BKAD
- d. Melakukan pembinaan terhadap posyantek, posyandu, kelompok usaha ekonomi masyarakat, PKK serta pelaksanaan BBGRM

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu pertama sebagai Laporan pertanggungjawaban atas kinerja dinas, yang kedua sebagai sarana evaluasi atas kinerja yang telah dicapai sehingga kedepan bisa lebih baik lagi.

C. Sistematika Pembahasan

- Bab I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

- Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan tentang:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen pelaksanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan beberapa tahun sebelumnya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

- Bab IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2021

- Lampiran :
 - 1) Perjanjian Kinerja
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD TAHUN 2021

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021, dengan adanya Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat terlihat pada tabel berikut;

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DPMD Tahun 2021.

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan penataan yang baik Jumlah desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa	100% -
2.	Meningkatkan perekonomian perdesaan dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa	Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan oleh Desa Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	114 Desa 100%

Indikator Tujuan (Indikator yang menjadi target dalam Indikator Kinerja Kunci outcome) adalah sebagai berikut;

No.	Indikator Outcome	Kondisi Awal periode RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
1.	Persentase pengentasan Desa Tertinggal	60,35%	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan Desa Mandiri	0,00%	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN PEMERINTAH DINAS PMD 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2021 ini sesuai dengan target yang terdapat pada Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat tercapai dengan baik, yang terlihat pada tabel di bawah ini;

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	100%	100%
2.	Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan oleh Desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi	-	-
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa	114 Desa	114 Desa
4.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%

Persentase pengentasan desa tertinggal tahun 2021

$$= \frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$$

$$= \frac{14}{16} \times 100\%$$

$$= 87,50\%$$

Persentase peningkatan desa mandiri tahun 2021

$$= \frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{91} \times 100\%$$

$$= 0,00\%$$

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD TAHUN 2021

Data diatas Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021, dari 114 yang ada terdapat 3 Desa Mandiri, 18 Desa Maju, 91 Desa Berkembang dan 2 Desa Tertinggal.

1. Program Penataan Desa

Program ini dengan kegiatan penyelenggaraan penataan desa pada tahun 2021 terdiri dari 2(dua) sub kegiatan, yaitu;

- a. Sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa dengan indikator jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi dan targetnya 2 desa dan 6 kelurahan, telah dilaksanakan.
- b. Sub kegiatan fasilitasi tata wilayah desa dengan indikator jumlah perbup batas desa yang disusun dan targetnya 20 Perbup, dengan capaian 12 perbup tahun 2020, 8 Perbup sudah difasilitasi provinsi. 19 Perbup masih dalam pembahasan Tim.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu;

- a. Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan target 13 kecamatan yang disosialisasikan Pemilihan kepala desa telah dilaksanakan.
- b. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan target 114 desa telah terlaksana, dengan telah tersalurkannya dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi.
- c. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa dengan target 113 BUM desa telah terlaksana.
- d. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa, pada aplikasi prodeskel untuk tahun 2021 ada 19 Desa swasembada, 95 Desa Swakarya, 0 Desa Swadaya. 2 Kelurahan swasembada, 6 kelurahan swakarya, dan 12 kelurahan swadaya.
- e. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa, dilaksanakan pembinaan aset desa di 13 kecamatan.
- f. Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Perlombaan Desa dan Kelurahan sudah terlaksana dengan baik, dengan hasil Desa Delima sebagai juara pertama pada perlombaan tingkat provinsi, dan Kelurahan Teluk Nilau menjadi juara II tingkat provinsi.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2021

3. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Program ini dengan kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. Terdiri dari;

- a. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat, 10 program pokok PKK telah dilaksanakan, dan perlombaan posyandu tingkat kabupaten sudah terlaksana. Perjalanan dinas luar provinsi dari TP PKK tidak terlaksana, lomba posyandu tingkat provinsi ditiadakan, sebagai dampak covid 19.
- b. Sub kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, perlombaan alat TGT tingkat provinsi dan nasional ditiadakan, sebagai dampak covid 19.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebesar Rp5.695.815.419,- dengan realisasi sebesar Rp4.696.231.241,- atau sebesar 82,45%. Digambarkan dalam tabel berikut ini;

Tabel III. 2. Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

No.	Program dan Kegiatan	APBD Murni (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan
I	Program penunjang urusan pemerintah daerah	4.042.474.052	4.157.372.381	3.713.724.208	89,33%
1.	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	22.491.000	22.491.000	20.741.000	92,22%
a.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22.491.000	22.491.000	20.741.000	92,22%
2.	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	3.454.436.698	3.368.178.569	3.204.707.671	95,15%
a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.339.546.948	3.225.208.819	3.067.737.921	95,12%
b.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	114.889.750	142.969.750	136.969.750	95,80%
3.	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	19.600.000	19.600.000	19.600.000	100,00%
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19.600.000	19.600.000	19.600.000	100,00%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN PEMERINTAH DINAS PMD 2021

4.	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	347.259.499	448.453.957	292.322.124	65,18%
a.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	6.938.032	6.938.032	6.938.032	100,00%
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.296.517	60.435.975	60.435.975	100,00%
c.	Penyediaan bahan logistik kantor	19.145.000	19.145.000	5.815.000	30,37%
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.130.950	40.130.950	36.430.950	90,78%
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	3.572.000	85,05%
f.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	233.549.000	317.604.000	179.130.167	56,40%
5.	Kegiatan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79.411.180	79.411.180	60.858.213	76,64%
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.048.617	1.048.617	1.048.617	100,00%
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.600.000	63.600.000	45.047.033	70,83%
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	14.762.563	14.762.563	14.762.563	100,00%
6.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	119.275.675	219.237.675	115.495.200	52,68%
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	94.944.800	94.944.800	93.109.200	98,07%
b.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7.347.875	7.347.875	7.310.000	99,48%
c.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	16.983.000	116.945.000	15.076.000	12,89%
II.	Program Penataan Desa	121.100.000	121.100.000	105.325.000	86,97%
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	121.100.000	121.100.000	105.325.000	86,97%
a.	Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	32.900.000	32.900.000	27.800.000	84,50%
b.	Fasilitasi tata wilayah desa	88.200.000	88.200.000	77.525.000	87,90%
III.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	383.500.957	366.341.142	340.741.120	93,01%
1.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	383.500.957	366.341.142	340.741.120	93,01%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN PEMERINTAH DINAS PMD 2021

a.	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	50.514.750	33.374.750	33.374.750	100,00%
b.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	161.099.750	161.099.750	136.999.750	85,04%
c.	Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	54.468.782	54.466.642	54.466.620	100,00%
d.	Fasilitasi penyusunan profil desa	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00%
e.	Fasilitasi pengelolaan aset desa	26.400.000	26.400.000	26.400.000	100,00%
f.	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	79.017.675	79.000.000	77.500.000	98,10%
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	977.502.165	1.051.001.896	536.440.913	51,04%
I.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	977.502.165	1.051.001.896	536.440.913	51,04%
a.	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	839.752.440	913.252.171	477.790.913	52,32%
b.	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	137.749.725	137.749.725	58.650.000	42,58%
	TOTAL ANGGARAN	5.524.577.174	5.695.815.419	4.696.231.241	82,45%

Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, realisasi keuangannya rendah, sebagai akibat dari Covid 19 dengan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD TAHUN 2021

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, walaupun ada kendala yang dihadapi. Untuk kedepan, agar dapat lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia agar tercapai sasaran strategis yang diinginkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 yang merupakan merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisien. Semoga ditahun-tahun mendatang program dan kegiatan DPMD capaian kinerjanya akan lebih baik lagi, Amin.

Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

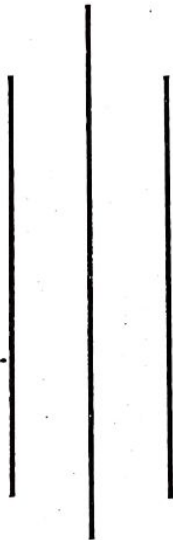


H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733

Email : dpmd@tanjabarkab.go.id Kode Pos :36512

KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag

PIHAK PERTAMA

H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19611106 198503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Tugas dan Fungsi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan menyelenggarakan fungsi;
- perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Penataan Desa	Persentase Desa dengan penataan yang baik	Bidang BAPD	$= \frac{\text{Jumlah dengan penataan yang baik}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas PMD	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	Bidang BAPD, Bidang PPMKP, Bidang BPKAD	Jumlah keseluruhan desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	Dinas PMD	
3.	Meningkatnya kerjasama desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	Bidang PPMKP	Jumlah keseluruhan BKAD yang difasilitasi	Dinas PMD	
4.	Meningkanya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	Bidang PPMKP	$= \frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan}}{\text{Jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan}} \times 100\%$	Dinas PMD	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

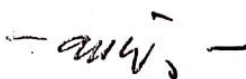
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penataan desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	100%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa
3.	Meningkatnya kerjasama desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD
4.	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.157.372.381,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
II. Program Penataan Desa	Rp 121.100.000,-	
III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 366.341.142,-	
IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.051.001.896,-	

Kuala Tungkal,

2021

Bupati Tanjung Jabung Barat



Drs. H. ANWAR SADAT, M. Ag

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

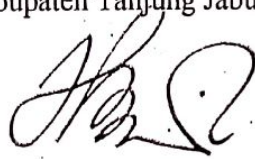
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (LPPK)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (LPPK)	- Sebelum tanggal 10 setiap bulan - 12 laporan
2.	Menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah	- Ketepatan waktu penyampaian - Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	- Bulan Februari - 100%
3.	Menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP/LAKIP) setiap triwulan dan tahunan	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	- Setiap triwulan - 5 laporan
4.	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	- Ketepatan waktu penyampaian - Nilai AKIP perangkat daerah	- Satu bulan setelah APBD disahkan - 65
5.	Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	- Februari 2021 - 1 berkas
6.	Menyampaikan laporan pengadaan barang dan jasa	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	- Setelah terbit DPA - 1 dokumen
7.	Menyampaikan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah bahan/data penyusunan LKPJ	- Awal Januari - 1 dokumen
8.	Menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) / laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	- Ketepatan waktu penyampaian - Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	- Sebelum 31 maret 2021 - 100%
9.	Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah rekomendasi BPK RI dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	- Sebelum 60 hari - 1 berkas
0.	Melaporkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan sesuai MCP KPK	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah dokumen kepatuhan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi MCP KPK	- Setiap triwulan - 4 dokumen
1.	Menyampaikan laporan tambahan penghasilan pegawai	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan TPP yang disampaikan	- Setiap awal minggu berikutnya - 44 laporan mingguan

Bupati Tanjung Jabung Barat


Drs. ANWAR SADAT, M. Ag

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpm�@tanjabbarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . : **HARIYATI, SKM**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2021

PIHAK KEDUA

H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

PIHAK PERTAMA

HARIYATI, SKM
Pembina
NIP. 19641215 198501 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS DINAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	6 dokumen
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%
		Jumlah total BMD yang terpelihara	55 Unit
		Persentase tingkat kedisiplinan pegawai	100%
		Cakupan layanan administrasi umum	100%
		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.157.372.381,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



HARIYATI, SKM
Pembina
NIP. 19641215 198501 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email :dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ENING ROSMIATI**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2021

PIHAK KEDUA

H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

PIHAK PERTAMA

Ir. ENING ROSMIATI
Pembina
NIP. 19651001 199403 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAWASAN PERDESAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa
2.	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%
3.	Meningkatnya kerjasama desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi	13 BKAD

Program	Anggaran	Keterangan
I. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 54.466.642,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
II. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.051.001.896,-	

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. ENING ROSMIATI
Pembina
NIP. 19651001 199403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpm@tanjabarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESSY SUZANNA, S. Pd. I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

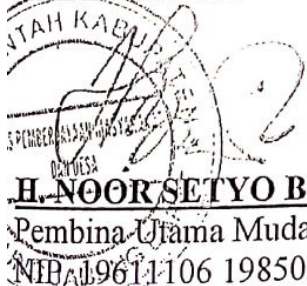
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003


DESSY SUZANNA, S. Pd I
Penata Tingkat I
NIP. 19780328 200604 2 013

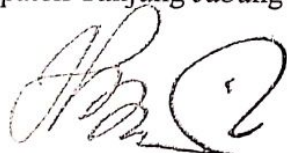
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penataan desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	100%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa

Program	Anggaran	Keterangan
I. Penataan Desa	Rp 121.100.000,-	Pendapatan
II. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 124.374.750,-	Asli Daerah (PAD)

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611106 198503 1 003

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESSY SUZANNA, S.Pd. I
 Penata Tingkat I
 NIP. 19780328 200604 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S. STP**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

PIHAK PERTAMA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 Desa

Program	Anggaran	Keterangan
I. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 187.499.750,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kuala Tungkal,

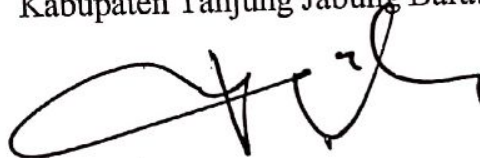
2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

Kepala Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpmd@tanjabarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANA FARADINA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HARIYATI, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2021

PIHAK KEDUA

HARIYATI, SKM

Pembina

NIP. 19641215 198501 2 001

PIHAK PERTAMA

ANA FARADINA, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19820402 200904 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 KEPALA SUB BAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen
		Jumlah laporan evaluasi	8 laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 22.491.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kuala Tungkal, 2021

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


HARIYATI, SKM

Pembina
 NIP. 19641215 198501 2 001


ANA FARADINA, SE

Penata Tingkat I
 NIP. 19820402 200904 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email: dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI HABIBAH, S.Ag**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARIYATI, SKM**
Jabatan : Sekretaris Dinas
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

HARIYATI, SKM

Pembina

NIP. 19641215 198501 2 001

PIHAK PERTAMA

SITI HABIBAH, S.Ag

Penata Tingkat I

NIP. 19771218 200604 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan
		Jumlah barang milik daerah yang dalam pemeliharaan	55 unit
		Jumlah laporan keuangan dan aset yang tepat waktu dan benar	13 laporan
		Jumlah pegawai yang mengetahui dan paham aturan kedisiplinan	51 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.368.178.569,-	Pendapatan
a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.225.208.819,-	Asli Daerah
b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 142.969.750,-	(PAD)
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 19.600.000,-	
a. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 19.600.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 448.453.957,-	
a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 6.938.032,-	
b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 60.435.975,-	
c. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 19.145.000,-	
d. Sub kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rp 40.130.950,-	
e. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.200.000,-	
f. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 317.604.000,-	
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 79.411.180,-	
a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1.048.617,-	
b. Sub kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 63.600.000,-	
c. Sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor	Rp 14.762.563,-	

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan
- b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Rp 219.237.675,-

Rp 94.944.800,-

Rp 7.347.875,-

Rp 116.945.000,-

Kuala Tungkal,

2021

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

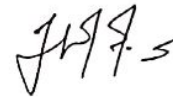


HARIYATI, SKM

Pembina

NIP. 19641215 198501 2 001

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SITI HABIBAH, S.Ag

Penata Tingkat I

NIP. 19771218 200604 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpmd@tanjabarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIMA RUSILOWATI, S.IP**
Jabatan : Kepala Seksi Administrasi dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desaa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY SUZANNA, S.Pd. I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DESSY SUZANNA, S.Pd. I
Penata Tingkat I
NIP. 19780328 200604 2 013

RIMA RUSILOWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19791012 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR
 PEMERINTAHAN DESA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 desa
		Jumlah desa yang akan melaksanakan pilkades	43 desa


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp 33.374.750,-	

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Bidang Bina Administrasi
 Pemerintahan Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Seksi Administrasi dan Pengembangan
 Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DESSY SUZANNA, S.Pd. I
 Penata Tingkat I
 NIP. 19780328 200604 2 013


RIMA RUSILOWATI, S.IP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19791012 201001 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN LOVITA, SKM**
Jabatan : Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Evaluasi Perkembangan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY SUZANNA, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

DESSY SUZANNA, S.Pd. I
Penata Tingkat I
NIP. 19780328 200604 2 013

PIHAK PERTAMA


DIAN LOVITA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19750404 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI BINA KELEMBAGAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 desa
		Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan profilnya	114 desa
		Jumlah desa yang dievaluasi perkembangan dan lomba	114 desa

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Rp 12.000.000,-	
b. Sub kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Rp 79.000.000,-	
	Kuala Tungkal,	2021

Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DESSY SUZANNA, S.Pd. I
 Penata Tingkat I
 NIP. 19780328 200604 2 013

Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Evaluasi
 Perkembangan Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DIAN LOVITA, SKM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750404 199703 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAMRI ERIADY, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Penataan Desa dan Bina Administrasi Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY SUZANNA, S.Pd. I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DESSY SUZANNA, S.Pd. I
Penata Tingkat I
NIP. 19780328 200604 2 013


TAMRI ERIADY, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19801025 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 KEPALA SEKSI PENATAAN DESA DAN BINA ADMINISTRASI DESA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penataan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan desa	114 desa
		Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi	2 desa persiapan dan 6 kelurahan
		Jumlah desa yang ada penetapan batas desa	20 desa

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan penataan desa		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Rp 32.900.000,-	
b. Sub kegiatan fasilitasi tata wilayah desa	Rp 88.200.000,-	
	Kuala Tungkal,	2021

Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DESSY SUZANNA, S.Pd. I
 Penata Tingkat I
 NIP. 19780328 200604 2 013

Kepala Seksi Penataan Desa dan Bina Administrasi Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat


TAMRI ERIADY, ST
 Penata Tingkat I
 NIP. 19801025 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESNITHA RAHAYU, SH**
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ENING ROSMIATI**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

Ir. ENING ROSMIATI

Pembina

NIP. 19651001 199403 2 002

PIHAK PERTAMA

DESNITHA RAHAYU, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19750618 200003 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN SOSIAL
 DASAR
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah PKK dan posyandu yang diberdayakan	422
		Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan	114 desa dan 20 kelurahan
		Pembinaan lokus desa stunting	114 desa,


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp 913.252.171,-	

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Ir. ENING ROSMIATI
 Pembina
 NIP. 19651001 199403 2 002


DESNITHA RAHAYU, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750618 200003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MERDIANSYAH, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ENING ROSMIATI**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan
Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

Ir. ENING ROSMIATI
Pembina
NIP. 19651001 199403 2 002

PIHAK PERTAMA

MERDIANSYAH, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19810902 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN
 SUMBER DAYA ALAM
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah PKK dan posyandu yang diberdayakan	422
		Jumlah desa yang fasilitasi pemanfaatan TTG	114 desa

Kegiatan

1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

Anggaran

Keterangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp 137.749.725,-

Kuala Tungkal,

2021

pala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. ENING ROSMIATI
 Pembina
 NIP. 19651001 199403 2 002



MERDIANSYAH, SE
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19810902 201101 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEFRIAN EFFENDI**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ENING ROSMIATI**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

Ir. ENING ROSMIATI

Penata Tingkat I

NIP. 19651001 199403 2 002

PIHAK PERTAMA

DEFRIAN EFFENDI

Penata Tingkat I

NIP. 19721214 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 desa
		Jumlah BUM desa yang dibina	113 BUM desa

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Rp 54.466.642,-	

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. ENING ROSMIATI
Pembina
NIP. 19651001 199403 2 002



DEFRIAN EFFENDI
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMILA HITANOVA, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP

Pembina

NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

AMILA HITANOVA, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19730313 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan desa	114 desa

Kegiatan

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Anggaran

Keterangan

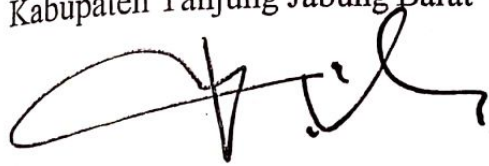
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)

Rp 161.099.750,-

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Kepala Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



AMILA HITANOVA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730313 200604 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINALDI, SAP**
 Jabatan : Kepala Seksi Bina Pengelolaan Aset Desa
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S. STP**
 Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi suntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S. STP

Pembina
 NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

RINALDI, SAP

Penata
 NIP. 19720525 199803 1 006

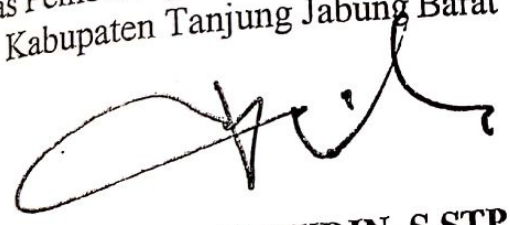
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 KEPALA SEKSI BINA PENGELOLAAN ASET DESA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan pengelolaan aset desa	114 desa

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa a. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp 26.400.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
 Pembina
 NIP. 19740506 199403 1 006

Kepala Seksi Bina Pengelolaan Aset Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat



RINALDI, SAP
 Penata
 NIP. 19720525 199803 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HAMZAH**
 Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas Pendapatan Desa
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S. STP**
 Jabatan : Kepala Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2021

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
 Pembina
 NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

Ir. HAMZAH
 Pembina
 NIP. 19660529 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI FASILITASI PENDAPATAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	2	3	4
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan pendapatan asli desa	114 desa

Kegiatan

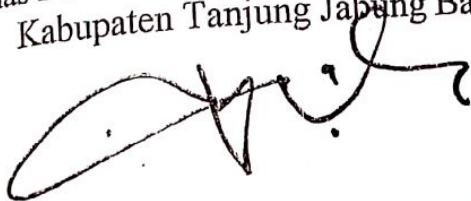
Anggaran

Keterangan

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Kepala Seksi Fasilitasi Pendapatan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. HAMZAH
Pembina
NIP. 19771008 201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PRATININGSIH**
 Jabatan : Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

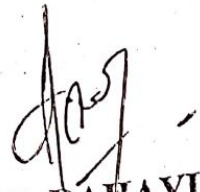
Nama : **DESNITHA RAHAYU**
 Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
 Selaku atasan langsung-pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2021

PIHAK KEDUA


DESNITHA RAHAYU, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750618 200003 2 005

PIHAK PERTAMA


PRATININGSIH, SE
 Penata Muda
 NIP. 19811025 200701 2 015

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021
 PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan data program kegiatan Bidang pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar	Jumlah data yang dikumpulkan	45 berkas
2.	Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan data dan bahan perencanaan program kegiatan Bidang pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar	Jumlah data yang direkap	45 berkas
3.	Mengolah data program kegiatan Bidang pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar	Jumlah data yang diolah	45 berkas
4.	Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan program Bidang pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar	Jumlah laporan yang dibuat	5 laporan kegiatan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<p>1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>	Rp913.252.171,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DESNITHA RAHAYU, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750618 200003 2 005

Kuala Tungkal, 2021
 Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi
 Keluarga
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


PRATININGSIH, SE
 Penata Muda
 NIP. 19811025 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email : dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos : 36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUDI**
Jabatan : Pelaksana Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AMILA HITANOVA, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

AMILA HITANOVA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730313 200604 2 008

PIHAK PERTAMA

WAHYUDI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19731010 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021
 PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Mengolah dan menganalisa bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang dianalisa	114 berkas
3.	Mengevaluasi bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang evaluasi	114 berkas
4.	Melaporkan hasil evaluasi bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah laporan yang dibuat	12 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa a. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp 161.099.750,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat



AMILA HITANOVA, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19730313 200604 2 008

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
 Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat



WAHYUDI
 Pengatur Tingkat I
 NIP. 19731010 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp. (0742) 322733
Email : dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos : 36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASPUL ANWAR**
Jabatan : - Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI HABIBAH, S.Ag**
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

SITI HABIBAH, S.Ag
Penata Tingkat I
NIP. 19771218 200604 2 004

PIHAK PERTAMA

KASPUL ANWAR
Pengatur Muda
NIP. 19730618 200701 1 020

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021
 PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Melakukan penyusunan bahan dan dokumentasi untuk rekonsiliasi aset	Jumlah kegiatan penyusunan	13 kali
2.	Melakukan inventarisasi barang per ruangan (KIR)	Jumlah KIR yang dibuat	13 buah
3.	Membuat laporan tentang kondisi aset yang ada	Laporan yang dibuat	12 laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.368.178.569,-	Pendapatan
a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.225.208.819,-	Asli Daerah
b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 142.969.750,-	(PAD)
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 19.600.000,-	
a. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 19.600.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 347.259.499,-	
a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 6.938.032,-	
b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 60.435.975,-	
c. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 19.145.000,-	
d. Sub kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rp 40.130.950,-	
e. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.200.000,-	
f. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 317.604.000,-	
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 79.411.180,-	
a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1.048.617,-	
b. Sub kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 63.600.000,-	
c. Sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor	Rp 14.762.563,-	

**5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- | | |
|---|------------------|
| a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan | Rp 219.237.675,- |
| b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Rp 94.944.800,- |
| c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Rp 7.347.875,- |
| | Rp 116.945.000,- |

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SITI HABIBAH, S.Ag
Penata Tingkat I
NIP. 19771218 200604 2 004

Pengelola Sarana dan Prasarana
Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



KASPUL ANWAR
Pengatur Muda
NIP. 19730618 200701 1 020



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI APRIANSYAH**

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI HABIBAH, S. Ag**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

SITI HABIBAH, S. Ag
Penata Tingkat I
NIP. 19771218 200604 2 004

PIHAK PERTAMA

DEDI APRIANSYAH
Pengatur
NIP. 19830422 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021
BENDAHARA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan	Jumlah dokumen yang dibuat	84 dokumen
2.	Melaksanakan pembukuan dan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan	Jumlah dokumen yang dibukukan	84 dokumen
3.	Melakukan pembayaran atas belanja keperluan dinas	Jumlah pembayaran yang dilakukan	200 kali
4.	Melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada pengguna anggaran	Jumlah laporan yang dibuat	12 laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.368.178.569,-	Pendapatan
a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.225.208.819,-	Asli Daerah
b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 142.969.750,-	(PAD)
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 19.600.000,-	
a. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 19.600.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 347.259.499,-	
a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 6.938.032,-	
b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 60.435.975,-	
c. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 19.145.000,-	
d. Sub kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rp 40.130.950,-	
e. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.200.000,-	
f. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 317.604.000,-	

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Rp 79.411.180,-
- b. Sub kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 1.048.617,-
- c. Sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor Rp 63.600.000,-

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan Rp 219.275.675,-
- b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp 94.944.800,-
- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp 7.347.875,-

Rp 116.983.000,-

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SITI HABIBAH, S.Ag
Penata Tingkat I
NIP. 19771218 200604 2 004

Bendahara
Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DEDI APRIANSYAH
Pengatur
NIP. 19830422 201101 1 005



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY SUMARNO**
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI HABIBAH, S. Ag**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA

SITI HABIBAH, S. Ag
Penata Tingkat I
NIP. 19771218 200604 2 004

PIHAK PERTAMA

EDY SUMARNO
Pengatur
NIP. 19820807 201001 1 023

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021
 PENGADMINISTRASI KEUANGAN
 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu Bendahara melaksanakan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah berkas yang dibuat	24 berkas
2.	Membantu Bendahara melaksanakan administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan PNS	Jumlah Berkas yang dibuat	24 berkas

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.368.178.569,-	Pendapatan
a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.225.208.819,-	Asli Daerah
b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 142.969.750,-	(PAD)
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 19.600.000,-	
a. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 19.600.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 347.259.499,-	
a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 6.938.032,-	
b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 60.435.975,-	
c. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 19.145.000,-	
d. Sub kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rp 40.130.950,-	
e. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.200.000,-	
f. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 317.604.000,-	
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 79.411.180,-	
a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1.048.617,-	
b. Sub kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 63.600.000,-	
c. Sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor	Rp 14.762.563,-	

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan

Rp 219.275.675,-

b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Rp 94.944.800,-

c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Rp 7.347.875,-

Rp 116.945.000,-

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SITI HABIBAH, S.Ag

Penata Tingkat I

NIP. 19771218 200604 2 004

Pengadministrasi Keuangan
Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

EDY SUMARNO

Pengatur

NIP. 19820807 201001 1 023



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYARIPUDIN**
Jabatan : Pelaksana Pengadministrasi Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

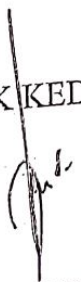
Nama : **DEFRIAN EFFENDI**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2021

PIHAK KEDUA


DEFRIAN EFFENDI
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199802 1003

PIHAK PERTAMA


SYARIPUDIN
Pengatur Tingkat I
NIP. 19790322 200701 1 010

INDIVIDU TAHUN 2021
PELAKSANA PENGADMINISTRASI KEUANGAN
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengelola pengadministrasi keuangan masuk dan keluar bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan	Jumlah pengadministrasi keuangan yang dikumpulkan	25 berkas
2.	Membukukan Pengadministrasi Keuangan masuk dan keluar bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pengadministrasi Keuangan yang dibukukan	25 berkas
3.	Menyusun rekapitulasi pengadministrasi keuangan masuk dan keluar bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Jumlah Pengadministrasi Keuangan yang direkap	25 berkas
4.	Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan program Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan	Jumlah laporan yang dibuat	5 laporan kegiatan

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa


Rp 54.466.642,-

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pelaksana Pengadministrasi Keuangan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan D
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DEFRIAN EFFENDI
 Penata Tingkat I
 NIP. 19721214 199803 1 003


SYARIFUDIN
 Pengatur Tingkat I
 NIP. 19790322 200701 1 010

PELAKSANA PEKERJA INDIVIDU TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengelola pengadministrasi keuangan masuk dan keluar bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan	Jumlah pengadministrasi keuangan yang dikumpulkan	25 berkas
2.	Membukukan Pengadministrasi Keuangan masuk dan keluar bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pengadministrasi Keuangan yang dibukukan	25 berkas
3.	Menyusun rekapitulasi pengadministrasi keuangan masuk dan keluar bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Jumlah Pengadministrasi Keuangan yang direkap	25 berkas
4.	Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan program Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan	Jumlah laporan yang dibuat	5 laporan kegiatan

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Rp 54.466.642,-

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pelaksana Pengadministrasi Keuanga
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan I
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

DEFRIAN EFFENDI
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199803 1 003

SYARIFUDIN
Pengatur Tingkat I
NIP. 19790322 200701 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
Email :dpmd@tanjabbarkab.go.id Kode Pos :36512
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. FIRDAUS, S. ST**
Jabatan : **Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MERDIANSYAH, SE**
Jabatan : **Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pdayagunaan Sumber Daya Alam**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kuala Tungkal,

2021

PIHAK KEDUA


MERDIANSYAH, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19810902 201101 1 005

PIHAK PERTAMA


A. FIRDAUS, S. ST
Pembina
NIP. 19660714 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2021
 ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN
 SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER
 DAYA ALAM
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan pengembangan ekonomi perdesaan	Jumlah bahan yang dikumpulkan	13 berkas
2.	Menganalisa bahan pengembangan ekonomi perdesaan	Jumlah bahan yang dianalisa	13 berkas
3.	Membuat laporan bahan pengembangan ekonomi perdesaan	Jumlah laporan yang dibuat	1 laporan
4.	Mendokumentasikan bahan pengembangan ekonomi perdesaan	Jumlah bahan yang didokumentasikan	13 dokumen


Kuala Tungkal, 2021

Kepala Seksi Pembangunan Kawasan
 Perdesaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
 Alam
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MERDIANSYAH, SE
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19810902 201101 1 005

Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
 Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan
 Pendayagunaan Sumber Daya Alam
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat



A. FIRDAUS, S.ST
 Pembina

NIP. 19660714 199102 1 001